

**PERAN MASYARAKAT NELAYAN DALAM PENINGKATAN  
EKONOMI DI DESA PEMATANG CENGAL TIMUR KECAMATAN  
TANJUNG PURA**

**Muhammad sholihin<sup>1</sup>, Hj. Kamaliah R<sup>2</sup>, Anjur Perkasa Alam<sup>3</sup>**

[Miramiraa1727@gmail.com](mailto:Miramiraa1727@gmail.com)

STAI Jam'iyah Mahmudiyah Tanjung Pura Langkat

**Abstrak**

Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui pendapatan masyarakat nelayan di Desa Pematang Cengal Kecamatan Tanjung Pura. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi nelayan dalam meningkatkan pendapatannya di Desa Pematang Cengal Timur Kecamatan Tanjung Pura. Untuk mengetahui peran masyarakat nelayan dalam peningkatan ekonomi di Desa Pematang Cengal Timur Kecamatan Tanjung Pura. Untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini digunakan riset lapangan yaitu dengan memakai alat- alat pengumpulan data melalui observasi, interview atau wawancara terstruktur, dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis. Dalam penelitian ini, digunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskripsi analisis yaitu dengan mendeskripsikan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara terstruktur pada sumber penelitian. Peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat nelayan di Desa Pematang Cengal Tanjung Pura telah mampu menjalankan perannya dengan efektif, Peran tersebut dapat dilihat dan dirasakan melalui program-program yang telah Pemerintah berikan kepada masyarakat nelayan seperti pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan perdampingan, dan kelembagaan nelayan serta memberikan kemudahan bagi nelayan dalam menjalankan usahanya seperti memberikan perhatian dan dukungan serta dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan. Upaya pemberdayaan masyarakat nelayan guna meningkatkan ekonomi di di Desa Pematang Cengal Tanjung Pura dalam meningkatkan ekonomi masyarakatnya telah meningkat dikarenakan dengan adanya upaya pemberdayaan masyarakat nelayan yang diberikan dari pemerintah, pendapatan masyarakat di di Desa Pematang Cengal Tanjung Pura Pantai mengalami peningkatan karena pemerintah tersebut telah memberikan bantuan berupa kartu nelayan, penyediaan sarana dan prasarana serta memberikan dana modal usaha kepada nelayan, dengan adanya bantuan tersebut masyarakat nelayan di di Desa Pematang Cengal Tanjung Pura sangat terbantu dan peningkatan ekonomi masyarakat Desa Pematang Cengal Tanjung Pura Pantai dapat meningkat dari tahun sebelum adanya pemberdayaan.

**Kata kunci :** Masyarakat Nelayan, peningkatan Ekonomi

**Abstract**

To find out the obstacles faced by fishermen in increasing their income in Pematang Cengal Timur Village, Tanjung Pura District. This study aims to determine the role of the fishing community in improving the economy in Pematang Cengal Timur Village, Tanjung Pura District. To obtain the data needed in this study, field research was used, namely by using data collection tools through observation, interviews or structured interviews, and documentation. The data obtained were then processed and analyzed. In this study, qualitative research was used with a descriptive analysis approach, namely by describing the research results obtained through structured interviews with research sources. The government's role in empowering fishing communities in Pematang Cengal Tanjung Pura Village has been able to carry out its role effectively. through programs that the Government has provided to fishing communities such as education and training, counseling and assistance, and fishermen's institutions as well as providing convenience for fishermen in running their businesses such as providing attention and support as well as in order to improve the welfare of the fishing community. Efforts to empower the fishing community to improve the economy in Pematang Cengal Tanjung Pura Village in improving the community's economy have increased due to the efforts to empower the fishing community given the command, the income of the community in Pematang Cengal Tanjung Pura Pantai Village has increased because the government has provided assistance in the form of fisherman cards, providing facilities and infrastructure as well as providing business capital funds to fishermen, with this assistance the fishing community in Pematang Cengal Tanjung Pura Village is greatly helped and the economic improvement of the Pematang Cengal Tanjung Pura Pantai community can increase from the year before the empowerment.

**Key words:** Fishing Community, Economic Improvement

**A. PENDAHULUAN**

Hasrat untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dalam arti sebenarnya adalah tujuan mulia yang hendak dicapai oleh bangsa Indonesia termasuk di Desa Pematang Cengal Timur Kecamatan Tanjung Pura. Peningkatan kesejahteraan dapat dimungkinkan apabila pendapatan penduduk mengalami kenaikan yang cukup hingga mampu memenuhi kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan kesehatan, keamanan dan mudah dijangkau setiap penduduk sehingga pada gilirannya penduduk yang miskin semakin sedikit jumlahnya. Kecamatan Tanjung Pura sendiri, banyak penduduk Tanjung Pura terutama yang tinggal dipesisir, mencari nafkah dengan menjadi seorang nelayan. Namun kenyataannya masih cukup banyak nelayan belum dapat meningkatkan hasil tangkapannya, sehingga tingkat

pendapatan nelayan tidak meningkat. Terlebih dahulu pengertian nelayan adalah suatu kelompok masyarakat yang kehidupan tergantung langsung pada hasil laut, baik dengan cara melakukan penangkapan ataupun budidaya. Mereka pada umumnya tinggal dipinggir pantai, sebuah lingkungan pemukiman yang dekat dengan lokasi kegiatannya.<sup>1</sup>

Dari hasil pengamatan lapangan penulisan, penulis melakukan wawancara awal dengan nelayan di Desa Pematang Cengal Timur Kecamatan Tanjung Pura. Adapun data dari hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada nelayan Desa Pematang Cengal Timur Kecamatan Tanjung Pura bahwasanya pendapatan yang tidak tetap yang didapatkan oleh nelayan perhari sangat mempengaruhi statistik pengeluaran nelayan perharinya, semakin tinggi pendapatan nelayan yang diterima semakin besar peluang tercukupinya kebutuhan nelayan sehari-hari. Semakin kecil pendapatan nelayan maka semakin kecil pula peluang pemenuhan kebutuhan nelayan sehari-hari.

Nelayan adalah suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya tergantung langsung pada hasil laut, baik dengan cara melakukan penangkapan ataupun budi daya. Mereka pada umumnya tinggal di pinggir pantai, sebuah lingkungan pemukiman yang dekat dengan lokasi kegiatannya.

Secara geografis, masyarakat nelayan adalah masyarakat yang hidup, tumbuh dan berkembang di kawasan pesisir, yakni suatu kawasan transisi antara wilayah darat dan laut.

Nelayan adalah orang yang hidup dari mata pencaharian hasil laut di Indonesia para nelayan biasanya bermukim di daerah pinggir pantai atau pesisir laut. Komunitas nelayan adalah kelompok orang yang bermata pencaharian hasil laut dan tinggal didesa-desa atau pesisir. Dilihat dari teknologi peralatan tangkap yang digunakan dapat dibedakan dalam dua katagori, yaitu nelayan modern dan nelayan tradisional. Nelayan modern menggunakan teknologi penangkapan yang lebih canggih dibandingkan dengan nelayan tradisional. Ukuran modernitas bukan semata-mata karena

---

<sup>1</sup> Masyur Imron, *Kemiskinan Dalam Masyarakat Nelayan*, (Jakarta: PMB-UPI, 2003), h. 7.

penggunaan motor untuk mengerakkan perahu, melainkan juga besar kecilnya motor yang digunakan serta tingkat eksploitasi dari alat tangkap yang digunakan. Perbedaan modernitas teknologi alat tangkap juga akan berpengaruh pada kemampuan jelajah operasional mereka. Seperti masyarakat yang lain, masyarakat nelayan menghadapi sejumlah masalah politik, sosial dan ekonomi yang kompleks. Masalah-masalah tersebut antara lain: Kemiskinan, kesenjangan sosial dan tekanan-tekanan ekonomi yang datang setiap saat, keterbatasan akses modal, teknologi dan pasar sehingga memengaruhi dinamika usaha, kelemahan fungsi kelembagaan sosial ekonomi yang ada, kualitas sumberdaya manusia yang rendah sebagai akibat keterbatasan akses pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik, degradasi sumberdaya lingkungan baik di kawasan pesisir, laut, maupun pulau-pulau kecil. Membengkaknya biaya-biaya operasi penangkapan karena meningkatnya harga bahan bakar minyak (bensin dan solar), sehingga nelayan mengurangi kuantitas operasi penangkapan.<sup>2</sup>

Penerimaan lebih kecil dibandingkan pengeluaran nelayan, hal ini mengakibatkan adanya perbedaan yang sangat jelas. Penerimaan nelayan sangat tergantung oleh Musim Barat dan Musim Timur, sementara pengeluaran mereka rutin untuk kebutuhan hidup keluarga. Melihat situasi dan kondisi para nelayan yang terus bekerja untuk dapat menghidupi keluarganya, mereka harus pergi melaut untuk menangkap ikan. Begitu besar rintangan yang harus dihadapi oleh para nelayan. Pada saat cuaca buruk hal seperti itu yang menjadi hambatan bagi mereka. Mereka tidak dapat melaut apabila ombak laut terlalu besar, badai, hujan beserta angin kencang. Jika cuaca terus menerus memburuk, tingkat kesulitan nelayan untuk mendapatkan hasil tangkapan semakin sulit. Seharusnya dengan tingkat kesulitan untuk mendapatkan tangkapan mereka, hasil tangkapan nelayan seharusnya dibayar dengan harga tinggi sesuai tingkat kesulitan untuk mendapatkannya. Tetapi pada kenyataannya di Desa Pematang Cengal Timur harga ikan tetap sama, sehingga pendapatan nelayan tidak meningkat.

---

<sup>2</sup> Dikutip dari Jurnal "acta Diurna" volume III.NO. 3, Fanesa Fargomeli, "Interaksi Kelompok Nelayan Dalam Meningkatkan Taraf Hidup Di Desa Tewil Kecamatan Sangai Kabupaten Maba Halmahera Timur. Tahun 2014

Kemiskinan nelayan akan semakin berkembang, jika kebijakan pembangunan perikanan tidak memihak kepada nelayan tradisional, yang mengakibatkan mereka tidak bisa meningkatkan hasil produksi penangkapan ikan. Kemiskinan nelayan dipicu dengan rendahnya pendapatan yang diterima oleh nelayan dari hasil penangkapan ikan.<sup>3</sup> Sebagai pendapatan masyarakat, pada umumnya dipergunakan sebagai tolak ukur keberhasilan, kemakmuran dan kemajuan perekonomian suatu masyarakat. Pendapatan tersebut digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan sisanya merupakan tabungan (*saving*) untuk memenuhi hari depan.

Pemerintah lebih cenderung memberikan perhatian terhadap program yang tidak menyentuh nelayan, bahkan hanya melakukan survei namun tidak menindak lanjuti para keluhan nelayan. Biasanya mereka datang dan bertemu dengan kelompok nelayan kemudian setelah menerima keluhan bagaimana memberdayakan nelayan, mereka pun pergi dan tak pernah datang lagi.

Rendahnya pendapatan nelayan merupakan salah satu faktor akibat rendahnya produktifitas nelayan yang ada di Desa Pematang Cengal Timur Kecamatan Tanjung Pura. Jika tidak bekerja nelayan tidak akan mendapatkan penghasilan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari dan akan mengakibatkan tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan semakin menurun. Modal kerja merupakan hal yang mempengaruhi pendapatan nelayan dengan tersedianya modal yang memadai maka nelayan dapat meningkatkan produksi karena nelayan dapat membeli perahu, alat tangkap, bahan bakar minyak, dan peralatan lainnya, serta biaya operasional nelayan, nelayan tersebut membutuhkan faktor-faktor utama yang memberikan keberhasilan kinerjanya, salah satunya adalah Bahan Bakar Minyak (BBM). BBM merupakan komoditas yang memegang peranan sangat vital dalam semua aktifitas ekonomi. Dalam perekonomian global saat ini, harga minyak dunia terus meningkat tidak bisa di pungkiri, kenaikan harga BBM jelas akan berdampak kemasyarakat luas hingga masyarakat kecil terutama masyarakat nelayan di Desa Pematang Cengal Timur Kecamatan Tanjung Pura.

---

<sup>3</sup> Diakses dari situs web \_(pada tanggal 05 Maret 18 pukul 23:32 wib).

Perekonomian nelayan Desa Pematang Cengal Timur Kecamatan Tanjung Pura sangatlah lemah dikarenakan oleh pendapatan, harga ikan nelayan yang tidak mencukupi untuk kehidupan sehari-hari. Hasil pendapatan nelayan yang diperoleh lebih sedikit dibandingkan hasil yang bekerja sebagai petani di Desa Pematang Cengal Timur Kecamatan Tanjung Pura. Pendapatan masyarakat nelayan pada dasarnya tergantung pada hasil tangkapan yang diperoleh oleh nelayan setempat, dan juga dipengaruhi oleh faktor eksternal dan faktor internal, dimana faktor internal misalnya pertumbuhan penduduk yang cepat, kurang berani mengambil resiko, cepat puas dan kebiasaan lain yang tidak mengandung modernisasi. Selain itu kelemahan modal usaha dari nelayan sangat dipengaruhi oleh pola pikir nelayan itu sendiri. Faktor eksternal yang mengakibatkan kemiskinan rumah tangga nelayan lapisan bawah antara lain proses produksi didominasi oleh toke pemilik perahu atau modal dan sifat pemasaran produksi hanya dikuasai kelompok dalam bentuk pasar monopoli. Pendapatan masyarakat nelayan secara tidak langsung akan mempengaruhi kualitas hidup mereka, karena pendapatan dari hasil berlayar merupakan sumber pemasukan utama bahkan satu-satunya bagi mereka, sehingga besar kecilnya pendapatan akan sangat memberikan pengaruh terhadap kehidupan mereka, terutama terhadap kemampuan mereka dalam mengelola lingkungan hidup mereka.

Fenomena yang terjadi pada masyarakat nelayan adalah pada saat musim ikan tiba maka kesempatan para nelayan untuk memanfaatkan pendapatannya, dan kebiasaan yang terjadi di kalangan masyarakat nelayan Desa Pematang Cengal Timur Kecamatan Tanjung Pura adalah mereka sering sekali menggunakan pendapatannya tersebut untuk membeli barang-barang. Kegiatan tersebut dilakukan baik oleh nelayan kaya maupun nelayan buruh. Masyarakat nelayan Desa Pematang Cengal Timur Kecamatan Tanjung Pura mempunyai gaya hidup konsumtif dan materialistis. Penyebab gaya hidup yang suka membeli barang-barang di dalam masyarakat nelayan disebabkan oleh lingkungan, pergaulan, pendidikan yang rendah, pendapatan, teknologi, status sosial di masyarakat dan etnis dikalangan masyarakat nelayan. Masyarakat nelayan sampai sekarang masih mempertahankannya

kebiasan gaya hidup nongkrong di warung kopi setelah pulang dari melaut kebiasaan ini menjadi ada istiadat bahkan menjadi kebiasaan turun temurun. Pada saat tingkat penghasilan besar gaya hidup nelayan cenderung boros dan sebaliknya ketika musim paceklik tiba mereka akan mengencangkan ikat pinggang, bahkan tidak jarang barang-barang yang dimilikinya akan dijual untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Karakteristik Masyarakat Pesisir memiliki ciri yang khas. Masyarakat pesisir adalah sekumpulan masyarakat yang hidup bersama-sama mendiami wilayah pesisir membentuk dan memiliki kebudayaan yang khas yang terkait dengan ketergantungannya pada pemanfaatan sumberdaya pesisir.

Karakteristik masyarakat pesisir berbeda dengan karakteristik masyarakat agraris atau petani, dari segi penghasilan, petani mempunyai pendapatan yang dapat dikontrol karena pola panen yang terkontrol sehingga hasil pangan atau ternak yang mereka miliki dapat ditentukan untuk mencapai hasil pendapatan yang mereka inginkan. Berbeda halnya dengan masyarakat pesisir yang mata pencahariannya didominasi dengan nelayan. Nelayan bergelut dengan laut untuk mendapatkan penghasilan, maka pendapatan yang mereka inginkan tidak bisa dikontrol. karakteristik sosial ekonomi masyarakat pesisir pada umumnya sebagian besar penduduknya bermata pencarian di sektor pemanfaatan sumberdaya kelautan (*marine resource based*), seperti nelayan, pembudidaya ikan, penambangan pasir dan transportasi laut. Tingkat pendidikan penduduk wilayah pesisir juga tergolong rendah. Kondisi lingkungan pemukiman masyarakat pesisir, khususnya nelayan masih belum tertata dengan baik dan terkesan kumuh. Dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang relatif berada dalam tingkat kesejahteraan rendah, maka dalam jangka panjang tekanan terhadap sumberdaya pesisir akan semakin besar guna pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Sifat dan karakteristik masyarakat pesisir adalah sebagai berikut:

1. Sangat dipengaruhi oleh jenis kegiatan. Contohnya seperti usaha perikanan tangkap, usaha perikanan tambak, dan usaha pengelolaan hasil perikanan yang memang dominan dilakukan.

2. Sangat di pengaruhi oleh faktor lingkungan, musim dan juga pasar.
3. Struktur masyarakat yang masih sederhana dan belum banyak dimasuki oleh pihak luar. Hal ini dikarenakan baik budaya, tatanan hidup, dan kegiatan masyarakat relatif homogen dan masing-masing individu merasa mempunyai kepentingan yang sama dan tanggung jawab dalam melaksanakan dan mengawasi hukum yang sudah disepakati bersama.
4. Sebagian besar masyarakat pesisir bekerja sebagai Nelayan. Nelayan adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang mata pencahariannya atau kegiatan usahanya melakukan penangkapan ikan.<sup>4</sup>

Masyarakat pesisir pantai (nelayan) di Desa Pematang Cengal Timur Kecamatan Tanjung Pura adalah kondisi kehidupan perekonomian masyarakat selalu tidak pasti, selain dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, kadang pula tidak, karena pendapatan yang mereka terima tidak seimbang dengan kebutuhan sehari-hari, sebab pendapatan nelayan sangat bergantung pada situasi dan kondisi alam. Kondisi alam yang tidak menentu, keberadaan ikan yang menetap karena selalu berpindah-pindah dari satu tempat ketempat lain, arus laut tidak stabil, adanya angin (baik angin timur, barat, barat laut dan barat daya) yang dapat menimbulkan ombak besar, fasilitas alat tangkap tidak memadai harga BBM dan harga barang tinggi, serta adanya kerusakan mesin dan perahu bocor sehingga menyebabkan pendapatan para nelayan menurun. Akibatnya pendapatan masyarakat minim dan mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan baik, tidak dapat membayar pajak penghasilan, keinginan mereka untuk memperoleh sesuatu tidak tercapai, dan bahkan pembayaran iuran pendidikan anak mereka sering tidak tepat waktu.

## **B. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Paparan Data**

#### **1. Profil Desa**

Desa Pematang Cengal telah dibentuk pada tahun 1910 yang dinamakan Desa Pematang Cengal. Nama desa ini berasal dari se orang pegawai sultan

---

<sup>4</sup> Diakses dari situs web [https://www. Psychologymania. com](https://www.Psychologymania.com) (pada tanggal 24 September 18 pukul 08:52 wib)

yang bernama Teungku Said Soelaiman yang diutus kesultanan Langkat untuk membuka hutan yang akan dijadikan ladang.

Dan pada suatu daerah Teungku Said Soelaiman menemukan tanah yang tingginya seluas 1 Ha yang disebut pematang. Di pematang tersebut terdapat serumpun serai. Maka atas dasar musyawarah masyarakat daerah tersebut dinamakan Pematang Serai. Dan itulah yang dipakai sampai sekarang.

Dari 240 desa yang ada di Kabupaten Langkat, Desa Pematang Cengal adalah salah satu desa yang sudah berhasil dan transparan dalam pengelolaan Dana Desa (DD). Pemerintah Desa Pematang Serai pantas dibanggakan, apalagi kepala desanya, Rahmad Syah SE memang dikenal sebagai kepala desa yang cerdas, ramah dan bersahaja.

Visi Desa Pematang Cengal adalah sebagai berikut:

Visi

***“Menampung Semua Aspirasi Masyarakat Untuk Mewujudkan Desa Pematang Serai Yang Maju Dan Dinamis”***

Misi Desa Pematang Cengal adalah sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan Pemerintah Desa yang baik dengan bersandikan pada prinsip keterbukaan, tanggung jawab dan partisipasi masyarakat.
- 2) Mewujudkan pembangunan secara merata di setiap dusun dengan melibatkan unsur.
- 3) Mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan terutama sektor pertanian dan nelayan.
- 4) Mengembangkan pentingnya peningkatan sumber daya manusia melalui dukungan program wajib belajar 9 tahun dan pendidikan anak usia dini.
- 5) Menghidupkan dan meningkatkan kembali lembaga – lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa.
- 6) Menumbuh kembangkan sistem perencanaan pembangunan partisipatif yang member kesempatan kepada seluruh lapisan masyarakat termasuk rumah tangga miskin (RTM) untuk melaksanakan perencanaan pembangunan secara mandiri yang lebih sesuai dengan prinsip – prinsip

pemerintah yang baik ( Good Governance) seperti partisipatif, transparan, dan akuntabel.

- 7) Menciptakan lapangan kerja.
- 8) Menggunakan dana dari pemerintah secara efektif dan seefisien mungkin

## **2. Pembangunan Desa Pematang Cengal**

Proyek jembatan senilai Rp80 juta yang berasal dari anggaran DD (Dana Desa) di Dusun X, Desa Pematang Cengal, Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat hampir rampung dikerjakan.

Hal ini tentu saja disambut senang warga disana yang mengucapkan terima kasih kepada Kades Pematang Cengal, Arusman atas perhatiannya terhadap sarana publik.

“Kami sebagai warga mengucapkan terima kasih kepada Pak Kades yang sudah peduli sama kami,” ujar salah seorang warga. Menurutnya, warga sangat mengapresiasi kinerja Kades Arusman yang sudah menjabat kepala desa dua periode.

“Kinerjanya sebagai kepala desa benar-benar diakui oleh warga sini, sehingga pembangunan di desa kami banyak sekali perubahannya,” ucap Dalem (48) warga setempat.

Sementara itu, Kades Pematang Cengal, Arusman menjelaskan setelah proyek jembatan ini selesai dikerjakan maka tentu saja akan memudahkan warga untuk mengangkut hasil pertaniannya ke luar daerah. Sebab, jembatan ini merupakan akses penghubung antara warga Dusun X Pematang Cengal dengan Dusun IX.

“Harapannya semoga hasil pertanian warga disini bisa terus meningkat,” ujarnya optimis. Sebelum ini, kata Arman, pihaknya juga sudah menyelesaikan proyek pembangunan jembatan di Suka Maju dengan anggaran Rp35 juta.

## **3. Sejarah Singkat Perikanan di Indonesia**

Pada masa itu, tepatnya 1 Januari 1948, Kementerian Kemakmuran Rakyat mengalami restrukturisasi dengan menghapus koordinator-koordinator. Sebagai gantinya, ditunjuk lima pegawai tinggi di bawah

menteri, yakni Pegawai Tinggi Urusan Perdagangan, Urusan Pertanian dan Kehewanan, Urusan Perkebunan dan Kehutanan, serta Urusan Pendidikan. Jawatan Perikanan menjadi bagian dari Urusan Pertanian dan Kehewanan.

Pada masa pengakuan Kedaulatan RI 27 Desember 1949, Kementerian Kemakmuran Rakyat kemudian dipecah menjadi dua kementerian, yaitu Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan dan Perindustrian. Pada masa itulah Jawatan Perikanan masuk ke dalam Kementerian Pertanian. Kementerian Pertanian pada 17 Maret 1951 mengalami perubahan susunan, yakni penunjukkan 3 koordinator yang menangani masalah Pertanian, Perkebunan dan Kehewanan. Di bawah Koordinator Pertanian, dibentuk Jawatan Pertanian Rakyat. Jawatan Perikanan pada masa itu telah berkembang menjadi Jawatan Perikanan Laut, Kantor Perikanan Darat, Balai Penyelidikan Perikanan Darat, dan Yayasan Perikanan Laut. Kesemua jawatan tersebut berada di bawah Jawatan Pertanian Rakyat. Struktur ini tidak bertahan lama. Pada 9 April 1957, susunan Kementerian Pertanian mengalami perubahan lagi dengan dibentuknya Direktorat Perikanan dan di bawah direktorat tersebut jawatan-jawatan perikanan dikoordinasikan.

Jatuh banggunya kabinet semasa pemerintahan parlementer mengakibatkan Presiden Soekarno menganggap bahwa sistem parlementer tidak cocok dengan kepribadian bangsa Indonesia. Pada 5 Juli 1957, presiden mengeluarkan dekrit untuk kembali pada UUD 1945. Istilah kementerian pada masa sebelum dekrit berubah menjadi departemen dan posisi istilah direktorat kembali menjadi jawatan. Pada 1962, terjadi penggabungan Departemen Pertanian dan Departemen Agraria dan istilah direktorat digunakan kembali. Pada masa kabinet presidensial paska dekrit, Direktorat Perikanan telah mengalami perkembangan menjadi beberapa jawatan, yakni Jawatan Perikanan Darat, Perikanan Laut, Lembaga Penelitian Perikanan Laut, Lembaga Penelitian Perikanan Darat, Lembaga Pendidikan Usaha Perikanan dan BPU Perikani.

Sejak era reformasi bergulir di tengah percaturan politik Indonesia, sejak itu pula perubahan kehidupan mendasar berkembang di hampir seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti merebaknya beragam krisis yang

melanda Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satunya adalah berkaitan dengan Orientasi Pembangunan. Dimasa Orde Baru, orientasi pembangunan masih terkonsentrasi pada wilayah daratan. Sektor kelautan dapat dikatakan hampir tak tersentuh, meski kenyataannya sumber daya kelautan dan perikanan yang dimiliki oleh Indonesia sangat beragam, baik jenis dan potensinya. Potensi sumberdaya tersebut terdiri dari sumberdaya yang dapat diperbaharui, seperti sumberdaya perikanan, baik perikanan tangkap maupun budidaya laut dan pantai, energi non konvensional dan energi serta sumberdaya yang tidak dapat diperbaharui seperti sumberdaya minyak dan gas bumi dan berbagai jenis mineral. Selain dua jenis sumberdaya tersebut, juga terdapat berbagai macam jasa lingkungan lautan yang dapat dikembangkan untuk pembangunan kelautan dan perikanan seperti pariwisata bahari, industri maritim, jasa angkutan dan sebagainya. Tentunya inilah yang mendasari Presiden Abdurrahman Wahid dengan Keputusan Presiden No.355/M Tahun 1999 tanggal 26 Oktober 1999 dalam Kabinet Periode 1999-2004 mengangkat Ir. Sarwono Kusumaatmaja sebagai Menteri Eksplorasi Laut.

Selanjutnya pengangkatan tersebut diikuti dengan pembentukan Departemen Eksplorasi Laut (DEL) beserta rincian tugas dan fungsinya melalui Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999 tanggal 10 November 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen. Ternyata penggunaan nomenklatur DEL tidak berlangsung lama karena berdasarkan usulan DPR dan berbagai pihak, telah dilakukan perubahan penyebutan dari Menteri Eksplorasi Laut menjadi Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 145 Tahun 1999 tanggal 1 Desember 1999. Perubahan ini ditindaklanjuti dengan penggantian nomenklatur DEL menjadi Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan (DELP) melalui Keputusan Presiden Nomor 147 Tahun 1999 tanggal 1 Desember 1999.

Dalam perkembangan selanjutnya, telah terjadi perombakan susunan kabinet setelah Sidang Tahunan MPR tahun 2000, dan terjadi perubahan nomenklatur DELP menjadi Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP)

sesuai Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 tanggal 23 November 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen.

Kemudian berubah menjadi Kementerian Kelautan dan Perikanan sesuai dengan Peraturan Presiden No. 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, maka Nomenklatur Departemen Kelautan dan Perikanan menjadi Kementerian Kelautan dan Perikanan, sedangkan struktur organisasi pada Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak mengalami perubahan.

Kondisi politik dan keamanan yang belum stabil mengakibatkan pemerintah merombak kembali susunan kabinet dan terbentuklah KABINET DWIKORA pada 1964. Pada Kabinet Dwikora ini, Departemen Pertanian mengalami dekonstruksi menjadi 5 buah departemen dan pada kabinet ini terbentuk Departemen Perikanan Darat/Laut di bawah Kompartemen Pertanian dan Agraria. Pembentukan Departemen Perikanan Darat/Laut merupakan respon pemerintah atas hasil Musyawarah Nelayan I yang menghasilkan rekomendasi perlunya departemen khusus yang menangani pemikiran dan pengurusan usaha meningkatkan pembangunan perikanan. Melalui pembentukan Kabinet Dwikora yang Disempurnakan, Departemen Perikanan Darat/Laut tidak lagi di bawah Kompartemen Pertanian dan Agraria melainkan mengalami reposisi dan bernaung di bawah Kompartemen Maritim. Di bawah Kompartemen baru, departemen tersebut mengalami perubahan nama menjadi Departemen Perikanan dan Pengelolaan Kekayaan Laut. Keadaan ini tidak berlangsung lama, pada 1965 terjadi pemberontakan Gerakan 30 September dan Kabinet Dwikora diganti dengan Kabinet Ampera I pada 1966.

Hill dalam studinya tentang ekonomi Indonesia sejak 1966 mencatat berbagai keberhasilan orde baru seperti kemampuan memanfaatkan harga minyak yang tinggi, pertumbuhan ekonomi yang berlanjut, perbaikan pendidikan, kesehatan dan gizi, selain beberapa catatan tantangan bagi masa depan.

Produksi perikanan meningkat dari 721 ribu ton pada tahun 1966 menjadi 1,923 ribu ton pada 1986. Produksi ikan meningkat menjadi 3.724 ribu ton tahun 1998. Setelah mengalami pertumbuhan negatif dalam periode peralihan (1966-1967), laju pertumbuhan produksi perikanan meningkat dari 3,5% (1968-1973) menjadi 5,3% per tahun (1974-1978). Periode berikutnya pertumbuhan produksi perikanan cenderung menurun. Produktivitas perikanan dalam era ini walaupun tumbuh dengan laju yang berfluktuasi (khususnya kapal), secara nominal meningkat dari rata-rata 4,3 ton/kapal periode 1974-1978 menjadi 8,4 ton per kapal periode 1994-1998.

Motorisasi perikanan merupakan salah satu penyebab peningkatan produksi sektor ini. Tahun 1966 motorisasi hanya meliputi 1,4% dari total armada perikanan sebanyak 239.900 unit, menjadi 5,8% pada tahun 1975, dan mencapai 16% dari total armada pada tahun 1980. Pada tahun 1998 armada perikanan bermotor telah mencapai 45,8% dari total sebanyak 412.702 unit, namun data tahun ini menunjukkan hanya 21% berupa kapal motor (“inboard motor”), dan bagian terbesar adalah perahu motor tempel dan perahu tanpa motor. Dengan demikian, basis perikanan masih dominan di wilayah pantai.

Konflik antara perikanan skala besar dan skala kecil mewarnai sejarah perikanan laut orde baru sebagai akibat dualisme struktur perikanan. Dualisme perikanan ditunjukkan oleh Bailey pada dua kasus penting yaitu introduksi trawl dan purse seine dan pengembangan budidaya udang. Kasus trawl menguatkan tesis Hardin tentang tragedi sumberdaya kepemilikan bersama. Ketika nelayan skala kecil dengan produktivitas rendah (1,4-6,7 ton/unit alat) semakin tersingkirkan oleh nelayan skala besar (trawl dan purse seine) dengan produktivitas masing-masing mencapai 70,4 ton/unit dan 38 ton/unit di tahun 1980, respon nelayan skala kecil adalah melawan dengan berbagai cara termasuk menggunakan bom molotov. Kondisi ini yang mendorong pemerintah melarang penggunaan trawl secara bertahap melalui Keppres 39/1980 yang diikuti Inpres 11/1982 dan SK Menteri Pertanian No. 545/Kpts/Um/8/1982 tentang penghapusan jaring trawl di seluruh perairan Indonesia terhitung mulai 1 Januari 1983.

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan tentang Peran Masyarakat Nelayan Dalam Peningkatan Ekonomi di Desa Pematang Cengal Timur Kecamatan Tanjung Pura, telah dipaparkan dan di analisis serta menghasilkan temuan-temuan penelitian, maka kegiatan selanjutnya adalah mengkaji hakikat dan makna dari temuan penelitian, masing-masing temuan penelitian akan di bahas dengan mengacu teori dan pendapat para ahli yang kompeten agar benar-benar dapat menjadikan setiap temuan kokoh dan layak untuk dibahas.

### **1. Pendapatan Masyarakat Nelayan di Desa Pematang Cengal Kecamatan Tanjung Pura**

Dalam bab ini akan disajikan beberapa uraian pembahasan yang sesuai dengan hasil penelitian, sehingga pada uraian pembahasan ini peneliti akan menjelaskan hasil penelitian dengan teori yang telah di jelaskan pada bab sebelumnya. Data-data diperoleh dari pengamatan wawancara mendalam serta dokumentasi sebagai mana telah peneliti mendeskripsikan pada analisis data kualitatif yang kemudian diidentifikasi agar sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Pengamatan wawancara yang telah dilaksanakan yaitu mengumpulkan data mengenai pemberdayaan masyarakat nelayan.

Sesuai dengan data yang diperoleh pemberdayaan masyarakat nelayan bertujuan untuk mencapai kesejahteraan sosial budaya dan hal ini menjadi dasar membangun kawasan pesisir. Kegiatan pemberdayaan masyarakat nelayan agar masyarakat membuka diri terhadap partisipasi dengan pihak LSM, swasta, dan perguruan tinggi yang memiliki kepedulian terhadap pembangunan kawasan di daerah tempat tinggal nelayan.

Permasalahan yang sering di hadapi oleh para nelayan adalah kemiskinan. Menurut Khofifah Indar Parawansa di dalam bukunya "Mengukur Paradigma Menembus Tradisi" kemiskinan merupakan faktor penting penyebab timbulnya masalah kesejahteraan masyarakat nelayan dalam mengelola sumberdaya alam, kurangnya pengetahuan dan keterampilan nelayan kecil.

Karena rendahnya sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat maka produk laut yang dihasilkan hanya sedikit. Hal ini disebabkan karena masih

rendahnya sumber daya nelayan. Sementara itu, akselerasi peningkatan ekonomi mereka juga lemah, akibat dari kurangnya akses informasi, teknologi, dan modal yang diberikan.

Hasil wawancara dengan Ibu Etik sebagai berikut: Menurut Ibu Etik (Pembina Pemberdayaan Masyarakat Nelayan), permasalahan yang sering terjadi karena adanya kemiskinan yaitu kurangnya ilmu pengetahuan dan keterampilan masyarakat nelayan. Karena mereka beranggapan bahwa pekerjaan menangkap ikan adalah pekerjaan turun temurun dari nenek moyang mereka. Jadi untuk merubah pandangan masyarakat nelayan itu sendiri juga sulit agar mereka mau lebih berkembang.

Sesuai pada bukunya yang berjudul “strategi hidup masalah nelayan” Kusnadi mengatakan pada dasarnya, pemberdayaan masyarakat nelayan bertujuan untuk mencapai kesejahteraan sosial-budaya dan hal ini menjadi dasar membangun kawasan pesisir. Untuk mencapai tujuan ini diperlukan dukungan kualitas sumberdaya manusia dan fungsi kelembagaan sosial ekonomi yang optimal dalam kehidupan warga. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan dan tujuan yang terukur, yang pencapaiannya dilakukan secara bertahap. Dengan memperhatikan kemampuan sumberdaya pembangunan yang dimiliki oleh masyarakat pesisir.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan tersebut di atas maka perlu diupayakan Program Pemberdayaan Masyarakat Nelayan. Program ini diarahkan untuk mengembangkan dan mematangkan berbagai potensi yang ada pada diri mereka sehingga dapat terlibat dalam penyelenggaraan pembangunan perikanan. Pemberdayaan ini merupakan kegiatan yang bertujuan agar nelayan dan keluarganya khususnya yang ada di Desa Tasikmadu masyarakatnya bisa hidup sejahtera. Untuk meningkatkan keterampilan dari masing-masing anggota kelompok.

Program dari pemberdayaan masyarakat nelayan di Kabupaten Trenggalek berupa pembinaan, penguatan kelembagaan, sosialisasi dan pelatihan keterampilan. Pembinaan ini maksudnya mereka dibina agar lebih mandiri mulai dari pembinaan masyarakat, pembinaan sosialisasi dan pembinaan KUB (Kelompok Usaha Bersama). Penguatan kelembagaan ini

maksudnya agar lembaga organisasi mereka lebih kuat contohnya seperti terbentuknya koperasi, bagaimana agar koperasi mereka itu menjadi kuat dan berkembang.

Sosialisasi seperti FGD (Focus Group Discussion) ini maksudnya mereka setiap berapa bulan sekali dikumpulkan di balai pertemuan untuk saling bertukar pikiran antara kelompok-kelompok lain baik itu kelompok yang maju maupun kelompok yang belum maju, mereka mencari solusi bersama terhadap permasalahan yang terjadi pada kelompok nelayan. Masalah yang terjadi itu biasanya masalah intern kelompok, contohnya seperti mereka mempunyai koperasi tapi anggotanya tidak membeli disitu, itu menyebabkan koperasi mereka tidak akan berkembang, cara mengurus dokumen kapal dan laporan pembukuan.

Pengarahan yang diberikan berupa pengetahuan kepada para nelayan tentang perundang-undangan penangkapan ikan. Memberikan bantuan pada kelompok nelayan yang benar-benar membutuhkan dengan cara membuat proposal terlebih dahulu lalu diajukan ke dinas, nanti dari dinas akan diseleksi untuk siapa tepatnya bantuan tersebut diberikan.

Pelatihan yang DKP berikan yaitu pelatihan perawatan kapal fiberglass, tentang bagaimana cara merawat kapal fiber nelayan agar mudah dalam menangkap ikan di laut. Pelatihan pengoperasian GPS Navigasi yaitu ketika melaut tidak tersesat, dengan adanya GPS dapat mempermudah nelayan dalam mengetahui koordinat lintang bujur, arah dan kecepatan. Selain itu, bermanfaat juga untuk mengetahui posisi saat di laut: menentukan rute perjalanan, menandai tempat-tempat penting seperti tempat yang dangkal, dan sebagainya. Sehingga dengan GPS akan bisa menghemat BBM karena rute bisa ditentukan sehingga kemungkinan untuk salah arah sangat kecil. Memperkenalkan jaring nilon yang mana manfaatnya agar tidak mudah tersangkut, jaringnya awet 10-12 tahun, perawatan mudah dengan cara tidak boleh terkena minyak dan tidak boleh terkena sinar matahari langsung, dengan memakai jaring nilon ini pendapatan nelayan meningkat secara signifikan.

Pemberian pelatihan tidak hanya dari DKP Kabupaten Trenggalek saja tetapi juga dari lembaga lainnya seperti yang UPI (Unit Pengolahan Ikan) Probolinggo belum lama ini memberikan pelatihan tentang perawatan kapal fiber dan dari KKP (Kementrian Kelautan dan Perikanan) memberikan keterampilan berupa pengoperasian GPS. Obyek dari Program Pemberdayaan Nelayan hanya perwakilan dari masing-masing kelompok. Program pemberdayaan masyarakat nelayan memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan nelayan.

## **2. Kendala Yang Dihadapi Nelayan Dalam Meningkatkan Pendapatannya di Desa Pematang Cengal Timur Kecamatan Tanjung Pura.**

Kendala yang dihadapi dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat nelayan antara lain SDM yang masih rendah dan juga pendidikan yang kurang. Masyarakat nelayan beranggapan pendidikan bukanlah kebutuhan yang paling utama. Sebagai seorang nelayan yang dibutuhkan hanya keterampilan dan kerja keras, bagaimana memperoleh tangkapan yang melimpah serta menjualnya dengan harga tinggi. Di sisi lain pendidikan. Sangat diperlukan nelayan sebagai contoh disaat melaut seseorang nelayan harus mengetahui arah angin, proses jual beli ikan, dan mengawetkan ikan.

Alasan orang tua nelayan tidak menyekolahkan anaknya ke jenjang perguruan tinggi karena orang tua menganggap bahwa anak harus meneruskan pekerjaan orang tua, selain itu disebabkan karena susah mencari pekerjaan. Pola pikir yang masih sempit membuat kehidupan nelayan semakin terpuruk. Selain itu, kondisi tergantung pada musim juga sangat berpengaruh pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Terkadang beberapa pekan nelayan tidak melaut dikarenakan musim yang tidak menentu. Kompleksnya permasalahan kemiskinan masyarakat nelayan terjadi disebabkan karena masyarakat nelayan hidup dalam suasana alam yang keras yang selalu diliputi ketidakpastian dalam menjalankan usahanya.

Pada musim paceklik (masa tidak ada tangkapan) desa-desa nelayan menghadapi masa yang sepi. Musim paceklik yang selalu datang tiap tahunnya dan lamanya pun tidak dapat dipastikan akan semakin membuat

masyarakat nelayan harus berada dalam keterpurukan ekonomi setiap tahunnya. Seperti ungkapan Ibu Etik pada tahun 2016, DKP menargetkan para nelayan dalam menangkap ikan yaitu dengan target 25.000 ton dalam setaun, namun kenyataannya karena cuaca buruk para nelayan hanya mencapai 15% nya saja yaitu 4632.982 ton. Dinas Perikanan merasa merugi dengan tangkapan yang begitu sedikit, ada juga yang beranggapan bahwa tangkapan paling sedikit di tahun 2010 yaitu sekitar 7.839.174 ton akan tetapi ternyata di tahun 2016 adalah sejarah terjelek bagi para nelayan. Padahal di tahun sebelumnya pada saat banyak ikan bisa mencapai 41.085.702 ton tangkapan ikan. Di tahun 2017 ini ditargetkan 15.000 ton produksi ikan. Perhitungan target tersebut di hitung mulai bulan januari-desember atau setiap satu tahun sekali.

Dengan memperhatikan fruktiasi produktivitas karena kondisi musim dan iklim, sumber daya perikanan merupakan potensi yang sangat menentukan eksistensi sebuah desa nelayan. Desa nelayan akan tetap ada jika sumber daya perikanan laut yang terkandung di perairan setempat masih memberikan kehidupan kepada nelayan sehingga musim paceklik merupakan hal biasa.

Kendala selanjutnya adalah armadanya masih didominasi oleh kapal-kapal kecil. Armada yang masih didominasi oleh skala kecil membuat hasil tangkapannya harus disesuaikan dengan kapal mereka, sehingga pendapatannya juga tergantung dengan hasil tangkapannya. Kemiskinan yang mereka alami membuat mereka hanya bisa membeli/membuat kapal ukuran kecil yang penting bisa digunakan untuk melaut dan menangkapa ikan.

Pada masa sekarang dampak yang terjadi terhadap masyarakat nelayan adalah berkurangnya pendapatan mereka atau tidak memperoleh sama sekali sehingga kondisi demikian menghadapkan rumah tangga mereka pada kesulitan hidup. Untuk itu, kemampuan sumber daya perikanan memberi kehidupan masyarakat nelayan tidak hanya berperan strategis dalam menentukan keberadaan sebuah desa nelayan, tetapi juga menjaga kelangsungan hidup masyarakat.

Dapat dipahami, jika ketergantungan nelayan terhadap teknologi penangkapan itu sangat tinggi. hal tersebut disebabkan selain kondisi sumber daya perikanan yang bersifat *mobile*, yaitu mudah berpindah dari satu tempat ke tempat lai, juga untuk menangkapnya nelayan perlu sarana bantu untuk dapat bertahan lama hidup di atas air.

Pada umumnya para nelayan masih mengalami keterbatasan teknologi penangkapan. Dengan alat tangkap yang sederhana, wilayah operasi pun menjadi terbatas, hanya disekitar perairan pantai. Di samping itu, nelayan tidak bisa menghadapi kondisi alam, karena alam tidak akan bisa dilawan. Hal yang bisa dilakukan dalam menghadapi adalah perlunya masyarakat nelayan memiliki penguasaan dalam aspek informasi, cuaca dan lokasi. Nelayan di berbagai wilayah membutuhkan membutuhkan dukungan yang konkret dari berbagai pihak mengenai prediksi cuaca dan lokasi mana berkemungkinan terjadi badai sehingga lokasi di laut dapat dihindari, dan alternatif wilayah tangkapan yang relatif aman didapatkan.

Selain rendahnya teknologi penangkapan yang dimiliki oleh nelayan pada umumnya, hal lain yang dihadapi nelayan adalah tidak semua nelayan memiliki alat tangkap. Bagi nelayan yang demikian, tidak ada alternatif lain kecuali harus bekerja pada orang lain yang membutuhkan tenaganya yaitu menjadi buruh nelayan.

Kemampuan untuk meningkatkan peralatan itu sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi seorang nelayan. Sesuai dengan kondisi ekonominya, peralatan yang mampu dibeli adalah peralatan yang sederhana, atau bahkan mungkin tidak mampu membeli peralatan tangkap sama sekali sehingga menempatkan kedudukannya tetap sebagai buruh nelayan. Oleh karena itu, untuk mengembangkan variasi alat tangkap yang dimiliki bukan hal yang mudah dilakukan. Akibatnya, kemampuan untuk melakukan atau meningkatkan hasil tangkapan menjadi sangat terbatas. Kondisi ini mengakibatkan nelayan mengalami kesulitan untuk dapat melepaskan diri dari kemiskinan karena kemiskinan dialami oleh para nelayan tersebut telah menjadi semacam “lingkaran setan”.

### **3. Peran Masyarakat Nelayan Dalam Peningkatan Ekonomi di Desa Pematang Cengal Timur Kecamatan Tanjung Pura.**

Hasil dari pemberdayaan adalah dengan terbentunya koperasi nelayan, hal ini dapat membantu para nelayan jika pada saat paceklik bisa membeli di koperasi nelayan sendiri yang di bandrol harga lebih murah, misalnya saja persiapan bensin untuk melaut, rokok untuk yang suka merokok, barang pokok seperti bensin, gula, kopi dengan harga rendah tidak seperti di pasaran yang harga melonjak naik sehingga dapat meresahkan nelayan kecil yang hanya berpenghasilan sedikit.

Masyarakat yang dulunya masih menggunakan alat tradisional kini dengan adanya keterampilan yang diberikan DKP sudah mulai mencoba menggunakan alat yang modern. Dengan menggunakan alat yang banyak ketika melaut. Jika hasil tangkapan ikan banyak maka dari segi perekonomian pendapatan akan meningkat. Sehingga dapat membantu pembangunan di desa pematang cengal. Serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kini pemberdayaan kelompok nelayan telah mandiri, dan semakin dapat meningkatkan perekonomian keluarga nelayan. Beberapa aspek yang bisa diperhatikan dan dijadikan prioritas dalam perencanaan dan formulasi strategi pemberdayaan nelayan miskin antara lain seperti:

a. Pengembangan teknologi dan skala usaha perikanan.

Teknologi yang digunakan nelayan pada umumnya masihlah teknoogi yang sederhana. Penggunaan teknologi yang masih sederhana ini kemudian berdampak pada rendahnya pendapatan mereka. Diperlukan upaya yang lebih dalam meningkatkan pendapatan lewat perbaikan teknologi dan penggunaan teknologi yang lebih modern. Bila mana telah diberlakukan penggunaan teknologi yang lebih modern dan efektif, pemberdayaan tersebut harus terus dilanjutkan dan disesuaikan dengan karekteristik dan kebutuhan nelayan, baik dari segi kapasitas kemampuan dan keterampilan sumberdaya mereka. Setelah adanya Pemberdayaan Kelompok Nelayan di Desa Pematang Cengal , masyarakat nelayan telah mendapatkan pengarahan dan pendampingan dengan berbagai macam jenis peralatan modern seperti Kapal Fiberglass,

GPS, Navigasi, dan Jaring Milinium guna meningkatkan penghasilan pengangkapan ikan masyarakat nelayan.

b. Pengembangan akses pemasaran.

Pasar adalah faktor penting dalam menjalankan usaha. Tidak adanya pasar dan strategi pemasaran bisa menjadi kendala utama sebuah usaha apabila tidak berkembang. Oleh karenanya, pemerintah Kabupaten Trenggalek membuka dan memberikan akses yang lebih luas lagi dalam pemasaran hasil tangkapan para masyarakat nelayan. Misalnya saja yang ada di Desa Pematang Cengal pemasaran ikan di pajak Tanjung Pura.

c. Penguatan kelembagaan para nelayan dan masyarakat pesisir.

Penguatan kelembagaan di kalangan masyarakat nelayan dapat membangun aksi solidaritas sosial dan kolektifitas masyarakat dalam bentuk kelompok-kelompok yang meninjau kebutuhan mereka. Melalui kelembagaan masyarakat ini diharapkan dapat meningkatkan nilai tukar masyarakat pesisir secara sosial dan ekonomi, serta menjadi sebuah pondasi yang kokoh dalam upaya menanggulangi kemiskinan secara mandiri. Peran pemerintah Desa Pematang Cengal dalam solidaritas masyarakat nelayan dengan mengadakan pertemuan setiap dua bulan sekali dimana pada saat tersebut mereka di berikan kesempatan untuk menyampaikan kendala yang dihadapi dalam menangkap ikan. Harapannya dengan adanya forum tersebut dalam mendorong para nelayan untuk lebih memiliki kekuatan secara sosial dan ekonomi yang mandiri. Pembinaan dan pelatihan diperlukan sebagai peran penting pemerintah Kabupaten Langkat untuk menciptakan masyarakat nelayan yang mandiri pada akhirnya.

d. Pembangunan sarana dan prasarana penunjang usaha perikanan.

Sarana dan prasarana merupakan faktor penting dalam menunjang usaha perikanan para nelayan miskin. Saran dan prasarana merupakan sebuah urat nadi dari berbagai macam kegiatan dan usaha. Minimnya saran dan prasarana yang dimiliki oleh para nelayan miskin di daerah pesisir yang masih tertinggal sangat mempengaruhi perkembangan usaha mereka. Pemerintah Kabupaten Langkat harus bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan kelompok nelayan yang ada di Kabupaten

Langkat untuk melihat keadaan dan kemudian memberikan bantuan pembangunan saran dan prasarana penunjang bagi nelayan.

### **C. KESIMPULAN**

1. Peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat nelayan di Desa Pematang Cengal Tanjung Pura telah mampu menjalankan perannya dengan efektif, Peran tersebut dapat dilihat dan dirasakan melalui program-program yang telah Pemerintah berikan kepada masyarakat nelayan seperti pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan perdampingan, dan kelembagaan nelayan serta memberikan kemudahan bagi nelayan dalam menjalankan usahanya seperti memberikan perhatian dan dukungan serta dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan.
2. Upaya pemberdayaan masyarakat nelayan guna meningkatkan ekonomi di di Desa Pematang Cengal Tanjung Pura dalam meningkatkan ekonomi masyarakatnya telah meningkat dikarenakan dengan adanya upaya pemberdayaan masyarakat nelayan yang diberikan dari perintah, pendapatan masyarakat di di Desa Pematang Cengal Tanjung Pura Pantai mengalami peningkatan karena pemerintah tersebut telah memberikan bantuan berupa kartu nelayan, penyediaan sarana dan prasarana serta memberikan dana modal usaha kepada nelayan, dengan adanya bantuan tersebut masyarakat nelayan di di Desa Pematang Cengal Tanjung Pura sangat terbantu dan peningkatan ekonomi masyarakat Desa Pematang Cengal Tanjung Pura Pantai dapat meningkat dari tahun sebelum adanya pemberdayaan.
3. Kendala upaya pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat nelayan di Desa Pematang Cengal Tanjung Pura, ada tiga kendala upaya pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat nelayan yaitu yang pertama

rendahnya kualitas sumber daya manusia yang dimana pola hidup konsumtif, pada saat penghasilan banyak, tidak ditabung untuk persiapan paceklik, melainkan dijadikan kesempatan untuk membeli kebutuhan sekunder. Namun ketika paceklik, pada akhirnya berhutang, yang justru semakin memperberat kondisi. Yang kedua keterbatasan anggaran yang dimana permasalahan klasik suatu program pemberdayaan tidak dapat berjalan dengan baik serta belum memenuhi kebutuhan nelayan di Desa Pematang Cengal Tanjung Pura Pantai. Dan yang ketiga rendahnya akses ilmu pengetahuan teknologi dan informasi yang sulit yang dimana masyarakat nelayan yang ada di Dusun Lauwo Pantai sangat sulit untuk mendapatkan informasi dikarenakan jaringannya yang kurang memadai sehingga masyarakat nelayan tersebut membutuhkan pusat informasi perikanan yang dibangun di daerah Desa Pematang Cengal Tanjung Pura Pantai. Solusinya yaitu peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat nelayan pemerintah dapat memberikan pemberdayaan yang lebih optimal dan pemerintah selalu mencari alternatif- alternatif lain untuk membantu masyarakat untuk mencari ide atau gagasan yang dapat dijadikan sebagai peluang dalam konteks

### Daftar Pustaka

- A.Muntaha AM., (2012), *Fiqih Zakat: Panduan Praktis & Solusi Masalah Kekinian*, Bandung: Insan Press
- Al-Hamid , Abdul Mahmud Al-Ba'ly, (2006), *Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syari'ah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- Al-Zuhaily, Wahbah, (2008), *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab, (Al-Fiqh Al-Islami Adilatuhu)*, Damaskus:Dar Al-Fikr.
- Arikunto,Suharsimi, (2010), *Metodelog Penelitian*, Jakarta: Insan Press.
- Asnainu,S.Ag,M.ag, (2008 ), *Zakat Produktif Dalam perspektif hukum Islam*,Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cetakan ke-1.
- Beik, Irfan Syauqi, *Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan :Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika, Jurnal Pemikiran dan Gagasan: Zakat & Empowering – Vol II 2009.*
- Departemen Agama RI, (2010), *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,Jakarta: Insan Press.
- Fahrudin, (2008), *Fiqh dan Manajemen Zakat Indonesia*, Malang: UIN Malang Press, cet-1, h.13
- Hafiduddin, Didin, (2002), *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press.

- Hasan, M. Ali (2008), *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Hasan, M, (2011), *Penggolongan Mustahik*, Jakarta: Insan Cipta.
- Hawkins, JoyceM, (1996), *KamusDwiBahasa Inggris- Indonesia, Indonesia Inggris*, Exford: Erlangga.
- JoyceM.Hawkins, (1996), *Kamus Dwi Bahasa Inggris- Indonesia, Indonesia Inggris*, Exford: Erlangga.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, [www.kbbi.web.id](http://www.kbbi.web.id).
- Marbun, B.N. (2003), *Kamus Manajemen*, Jakarta: Pustaka Sinar, Cet III.
- Mathori, (2008), *Kawajiban-kewajiban Zakat*, Jakarta: Insan Press.
- Norvadewi, *Optimalisasi Peran Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Indonesia, Jurnal Pemikiran Hukum Islam: Mazahib*, Vol. 10, N. 1, Juni, 2012.
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 23, 24 Agustus 1994
- Qadir, Abdurrahman , (1998), *Zakat: Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Qaradhawi, Yusuf ( Asmuni SZ: Penerjemah ), (1997)*Kiat Sukses mengelola Zakat*, Jakarta: Media Da"wah.
- Qardawi, Yusuf, (2010), *Hukum Zakat*, Jakarta: Rieneka Cipta.
- Ridwan, (2010), *Belajar Mudah Penelitian*, Bandung:Alfabeta.
- Rusli, Abubakar Hamzah, dan Sofyan Syahnur, *Analisis Dampak Pemberian Modal Zakat Produktif Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Aceh Utara, Jurnal Ekonomi Pascasarjana universitas Syiah Kuala, Vol. 1, No. 1, Februari 2013*.
- Sartika, Mila, *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta, Jurnal Ekonomi Islam: La Riba, Vol. II, No.1, Juli 2008*.
- Soemitra, Andri, (2009), *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana.
- Tambunan, Tulus, (2001), *Perekonomian Indonesia : Teori dan Temuan Empiris*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Tim Pustaka Agung Harapan, (2012), *Kamus Ilmiah populer* ,Surabaya: CV. Pustaka Agung Harapan.
- Tohar, M. (2000), *Membuka Usaha Keci*, Yogyakarta: Kansius.
- Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Zakat Produktif.  
[www.kemenag.go.id](http://www.kemenag.go.id), diakses tanggal 17 februari 2017, pukul 21.00.
- Yasin, Ibrahim, (2008), *Golongan Yang Berhak Menerima Zakat*, Bandung: Pussaka Assalam.
- Zuhdi, Masjfuk, (1997), *Masail Fiqhiyyah*, Jakarta: Gunung Agung.